

PENGEMBANGAN PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MEDAN

Rahmad Wiradinata*, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Indarja
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Rahmadwiradinata23@gmail.com

Abstrak

Otonomi adalah penyerahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan biaya yang cukup besar guna menyelenggarakan pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintahan daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya yang ada diwilayahnya termasuk sumber daya di sektor pariwisata. sektor pariwisata salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) sekarang ini. rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah: *Pertama* :Bagaimana Upaya Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Medan, *Kedua*: Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang bersifat kualitatif atau data yang diperoleh berdasarkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. dan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yang diharapkan dapat menggambarkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan dari hasil penelitian secara menyeluruh mengenai pengembangan pariwisata oleh dinas pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, dapat diketahui: *Pertama* , upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata kota Medan meliputi: pengembangan perencanaan pengelolaan pariwisata, pengembangan metode pengelolaan pariwisata, pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pemberdayaan masyarakat setempat, pengembangan atraksi seni budaya, pengembangan promosi/pemasaran, pengembangan kemitraan, dan pembentukan tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pengembangan pariwisata. *Kedua*, adapun hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata kota Medan adalah keterbatasan anggaran, keamanan dan kenyamanan lingkungan yang belum terjaga, rendahnya sadar wisata masyarakat tentang peran dan arti pariwisata, kurangnya pembangunan infrastruktur, masih adanya obyek wisata yang terikat ahli waris.

Kata Kunci : Pengembangan; Dinas Pariwisata; Pariwisata; Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Autonomy is the assignment of tasks from the central government to local governments in the framework of the government bureaucratic system. Local governments are given the authority to manage and manage their own households. in organizing regional government requires a large enough cost to hold local government. Therefore, local governments are given broader authority to manage the resources in their area, including resources in the tourism sector. tourism sector is one of the potential sectors to be developed in order to increase Regional Original Revenue (PAD) now. the formulation of the problem in writing this law are: First: How the Tourism Office Efforts in Tourism Development to Increase Local Revenue (PAD) in Medan City, Second: What Constraints Faced by the Tourism Office in Tourism Development in Medan City. The method of approach used in this study is normative juridical namely qualitative research or data obtained based on secondary data. The research specifications used are descriptive analytical. and data analysis methods using qualitative analysis which is expected to illustrate the facts based on the results of a comprehensive research on the development of tourism by the tourism office in

increasing the Regional Original Income in the city of Medan. Based on the results of the research which was later outlined in the writing of this law, it can be seen: First, the tourism development efforts undertaken by the Medan City Tourism Office include: developing tourism management planning, developing tourism management methods, developing tourist objects and attractions, empowering local communities, developing attractions cultural arts, promotion / marketing development, partnership development, and the formation of a Development, Supervision and Control team for tourism development. Secondly, the obstacles faced by the Medan City Tourism Office are budget constraints, environmental safety and comfort that have not been maintained, the low awareness of community tourism about the role and meaning of tourism, the lack of infrastructure development, the existence of attractions bound by heirs.

Keywords: *Development; Tourism Office; Tourism, Local Revenue.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi adalah penyerahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat yang diatur di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya, membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. usaha memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka program pengembangan pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi daerah. pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. dengan adanya pariwisata ini, maka suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada, akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata.

Pemerintah dalam hal ini para *stakeholders* kepariwisataan yang menyadari besarnya potensi kepariwisataan di daerah berusaha menggali, mengembangkan serta

membangun aset obyek dan daya tarik wisata, yang merupakan modal awal untuk bangkitnya kegiatan pariwisata. keputusan ini harus di tindak lanjuti dengan memikirkan dan mengusahakan serta membenahi potensi obyek dan daya tarik wisata.¹

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial dan budaya. namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat. untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi manusia dan meminimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul maka pengembangan pariwisata perlu didahului dengan kajian yang mendalam, yakni dengan melakukan penelitian terhadap semua sumber daya pendukungnya.²

Kota Medan memiliki wilayah yang cukup potensial dikembangkan dengan didukung oleh SDA dan SDM yang cukup besar. memiliki banyak obyek wisata yang perlu dikembangkan guna dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan PAD. obyek wisata yang ditawarkan antara lain adalah wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner, serta wisata seni dan budaya.

Namun demikian harus diakui masalah dan tantangan dalam pengembangan obyek wisata akan semakin berat dan kompleks dengan banyaknya daerah lain di sekitar kota medan yang memiliki daerah strategis dan potensi yang semakin kompetitif. disamping permasalahan menjamurnya dan beragamnya sektor pariwisata yang terdapat di provinsi Sumatera Utara, sudah seharusnya kota Medan juga harus membenahi fasilitas pariwisata yang lainnya, seperti sarana dan prasarana obyek wisata yang disediakan yang kurang memadai, keamanan disekitar obyek wisata juga harus diperhatikan, seperti obyek wisata yang baru dibenahi sudah banyak mengalami kerusakan, dan parkir kendaraan yang disediakan tidak mencukupi sehingga menyebabkan kemacetan. dari sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kemacetan tersebut bisa mengurangi minat para wisatawan untuk berkunjung, hal ini tentunya akan berimbas pada pendapatan daerah dari sektor pariwisata. yang mana selama ini sektor pariwisata merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan.

Selain regulasi otonomi daerah dan peraturan lainnya, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah termasuk potensi pariwisata adalah dari kesiapan daerah itu sendiri untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. dalam hal ini Dinas Pariwisata kota Medan perlu mengimplementasikan pelimpahan tugas dan wewenang dalam otonomi daerah sebagai salah satu kewenangan/urusan publik untuk mendatangkan keuntungan melalui

¹ Muhammad Tahwin, "Pengembangan Obyek Wisata Sebagai Industri Studi Kasus Kabupaten Rembang." Vol 1, Nomor3-2003, hlm 236-249

² Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, (Yogyakarta : ANDI, 2006), hlm 47

dampak positif pengembangan pariwisata, baik bagi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun bagi masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Dinas Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Medan ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata di kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada dinas pariwisata kota Medan mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada Dinas Pariwisata kota Medan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di kota Medan.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis, meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut penelitian kepustakaan (*library research*). untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan maka dilakukan juga penelitian lapangan (*field reseach*).

C. Sumber data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel-artikel, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

1. Bahan Hukum Primer

Diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka

terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, jurnal, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Metode pengumpulan data

1. Studi Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis atau film baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record*. dokumen yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah dokumen mengenai hal-hal yang berhubungan dengan data-data pengembangan pariwisata pada kota Medan yang diperoleh dari Dinas Pariwisata di kota Medan.

E. Metode analisis data

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif karena hasil penelitian diharapkan dapat mendeskripsikan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis mengenai pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Medan.

F. Metode penyajian data

Dalam penelitian ini penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Sajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam data yang sebelumnya telah di reduksi, dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Medan

Kota Medan sebagai ibukota provinsi Sumatera Utara secara umum adalah kota adalah kota terbesar ketiga di Indonesia dan kota terbesar di pulau Sumatera. perkembangan kota Medan mengalami pasang surut. pada masa sebelum munculnya perkebunan di Sumatera Utara, perkembangan kota Medan berada dibawah kota Padang. namun sejak munculnya industri perkebunan di Sumatera Utara atau tepatnya di Sumatera bagian timur, perkembangan kota Medan mengalami peningkatan yang cukup drastis.

Geografi kota Medan terletak pada $3^{\circ}30' - 3^{\circ}43'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}35' - 98^{\circ}44'$ Bujur Timur. untuk itu topografi kota Medan cenderung miring keutara dan berada pada ketinggian 2,5-37,5 meter diatas permukaan laut. posisi dan letak kota Medan berada di dataran pantai timur Sumatera, persis diantara selat Malaka dan jajaran pegunungan yang

membujur dari barat daya sampai wilayah tenggara pulau Sumatera. secara administratif wilayah kota Medan berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang di bagian Utara, Timur dan Selatan. serta di bagian Barat berbatasan dengan Selat Malaka.

B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Medan

Dinas Pariwisata kota Medan adalah salah satu dinas daerah yang terletak di kota Medan yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pariwisata. pembentukan organisasi ini didasarkan pada Peraturan Walikota Medan No.1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Pada bagian kedua puluh tiga Pasal 78 Angka (3) disebutkan bahwa Dinas Pariwisata dibentuk untuk menjadi pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No.1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Pasal 78 Angka (4) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata
- 4) Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

- 5) Pelaksanaan tugas pembentukan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait tugas dan fungsinya.

C. Upaya Pengembangan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Medan

Wilayah kota Medan salah satu wilayah yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan dibidang sektor pariwisata. menurut Sujadi pengembangan merupakan suatu proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, untuk menyempurnakan produk yang sudah ada yang bisa dipertanggung jawabkan. untuk melakukan pengembangan kebijakan maka perlu juga mengetahui potensi yang ada di kota Medan dalam rangka pengembangan kebijakan.

Pengembangan pariwisata sebagai suatu destinasi tujuan wisata yang dilakukan Dinas Pariwisata di Kota Medan mencakup tiga aspek. ketiga aspek tersebut adalah industri pariwisata, pemasaran/promosi dan *stakeholder* kepariwisataan. ketiga aspek ini disinergikan oleh Dinas Pariwisata kota Medan untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada di kota Medan saat ini. pada dasarnya bagi pengembang pariwisata ketiga aspek tersebut harus direncanakan bersama *stakeholder* terkait baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk menemukan strategi dan program pengembangan masing-masing aspek.

Dalam pengembangan pariwisata di kota Medan, Dinas Pariwisata kota Medan melakukan beberapa upaya pengembangan dibidang sektor ini. beberapa upaya pengembangan tersebut adalah :

a. Perencanaan Pengelolaan Pariwisata Kota Medan

Perencanaan dalam pengembangan pariwisata tujuannya memenuhi kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang. dalam perencanaan pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat mendukung kegiatan wisata para calon wisatawan. pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya adalah :

a) Manajemen Yang Akan Mengelola Pariwisata

Manajemen yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata kota Medan dalam mengembangkan pariwisatanya adalah dengan perekrutan tenaga kerja profesional dibidang pariwisata di lingkungan Dinas Pariwisata. tentunya harus bertanggung jawab dan kompeten dalam bidangnya. dalam hal ini Dinas Pariwisata kota Medan melakukan restrukturisasi organisasi agar manajemen lebih baik dari waktu ke waktu.

b) Sarana dan Prasarana Fasilitas

Dinas Pariwisata kota Medan juga sangat memperhatikan perencanaan pengembangan sarana-prasarana dan fasilitas

penunjang wisata para calon wisatawan dengan cara:

- 1) Membangun fasilitas-fasilitas khusus pariwisata dan prasarana umum dengan penyediaan fasilitas air bersih, listrik, lahan parkir, mushola dan sebagainya.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum, prasarana transportasi dan fasilitas pariwisata guna mendorong pertumbuhan daya saing wilayah pengembangan pariwisata yang tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan para wisatawan dan memberikan kenyamanan saat wisata.
- 3) Penataan dan peningkatan sarana penunjang pariwisata seperti hotel, rumah makan dan lain-lain.

b. Pengembangan Metode Pengelolaan Pariwisata

Dalam menyinergikan pengembangan pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata diperlukan suatu metode pengembangan yang menjamin keterlibatan semua aspek dan komponen pariwisata. berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata kota Medan dalam metode pengelolaan pariwisatanya melakukan hal-hal berikut:

- a) Pengkonsultasian dengan semua pemangku kepentingan dengan membangun sinergitas dan mengembangkan pola kerjasama antar pemangku

kepentingan dengan jalan melakukan program kerja bersama.

- b) Penyusunan kajian akademis Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota (RIPPARKOT) kota Medan. fungsi RIPPARKOT ini adalah sebagai:

- 1) Pedoman pembangunan pariwisata.
- 2) Pedoman bagi pengelolaan kawasan wisata yang potensial.
- 3) Pedoman pembinaan dalam pembangunan kawasan pariwisata, daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata, sumber serta investasi pembangunan dibidang kepariwisataan.
- 4) Landasan bagi pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata.

c. Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata

Suatu destinasi wisata tentunya harus memiliki daya tarik untuk menarik minat wisatawan dan mendorong serta memperbesar arus kunjungan. Dinas Pariwisata kota Medan dalam merencanakan daya tarik wisata dengan menumbuh kembangkan daya tarik wisata baru yang potensial dan diminati oleh wisatawan dengan mengadakan event-event daerah dan mengembangkan produk pariwisata yang berbasis kearifan lokal atau budaya daerah setempat.

Upaya dan program yang dilakukan Dinas Pariwisata kota Medan dalam mengembangkan suatu objek dan daya tarik wisata adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan lebih jauh potensi objek-objek wisata yang dimiliki dalam menunjang kepariwisataan di daerah kota Medan.
- b) Membangun fasilitas-fasilitas khusus pariwisata dan prasarana umum dengan penyediaan fasilitas air bersih, listrik, lahan parkir dikawasan obyek wisata.
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum, prasarana transportasi dan fasilitas pariwisata guna mendorong pertumbuhan daya saing dikawasan obyek wisata.
- d) Meningkatkan kemampuan serta keahlian Sumber SDM dalam hal memberikan pelayanan terhadap wisatawan seperti Pemandu Wisata (*guide*) dan lainnya.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam perencanaan pengembangan suatu obyek dan daya tarik wisata, maka diperlukan partisipasi dari masyarakat sekitar obyek wisata tersebut agar mewujudkan lingkungan pariwisata yang baik. dalam hal ini masyarakat turut menjaga keamanan dan kenyamanan disekitar obyek wisata dan menjaga sarana dan prasara umum yang mendukung kegiatan pariwisata yang ada disekitar obyek wisata, serta masyarakat sekitar diharapkan mampu memberikan pelayanan

yang baik bagi wisatawan dan mampu mengelola suatu produk khas wisata daerah tersebut.

Dari penjelasan diatas Dinas Pariwisata kota Medan juga melakukan pemberdayaan masyarakat setempat dengan cara:

- a) Mengembangkan keterampilan mengelola produk wisata serta layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang pariwisata.
- b) Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pariwisata yang baik.
- c) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan.

e. Pengembangan Atraksi Budaya

Pemerintah kota Medan khususnya Dinas Pariwisata telah mengembangkan atraksi budaya untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke kota Medan, yang tentunya berdampak terhadap pendapatan daerah kota Medan dari sektor pariwisata. dalam pengembangan atraksi seni budaya tersebut Dinas Pariwisata melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan event kepariwisataan nasional dalam dan luar daerah.
- b) Mensosialisasikan semua hotel berbintang mengadakan pertunjukan kesenian tradisional sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataaan.

- c) Mengadakan Pameran dan Atraksi seni kota Medan dalam dan luar Negeri
- d) Menyelenggarakan berbagai event-event atraksi budaya tahunan dan pertengahan tahun.

f. Pengembangan Promosi/ Pemasaran

Bidang Promosi/ pemasaran wisata adalah salah satu bagian yang ada di dalam susunan organisasi Dinas Pariwisata. dan bidang pemasaran wisata memiliki fungsi dasar untuk menyelenggarakan pemasaran dan promosi, baik itu dalam lingkup regional maupun interregional, selanjutnya bidang ini juga memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan data dan informasi khususnya terkait dengan kondisi pariwisata di kota Medan.

Bidang pemasaran wisata sebagai promotor utama promosi pariwisata di kota Medan, memiliki peranan yang penting dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di kota Medan. melalui berbagai upaya yang telah diselenggarakan antara lain yaitu melalui program :

- a) Mengadakan festival tahunan sekaligus mempromosikan destinasi wisata.
- b) Meningkatkan Dukungan promosi pariwisata kota Medan pada kegiatan APEKSI regional dan Nasional.
- c) Mengadakan Medan *tourism video contest*.
- d) Pembuatan plank sapta pesona dan objek wisata.

- e) Pembuatan Icon Medan Rumah Kita.
- f) Aksi sadar pesona dan sapta wisata.
- g) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat disuatu daerah wisata, agar dapat menerapkan sapta pesona (aman, tertib, sejuk, bersih, indah, ramah ,kenangan) dalam menerima kedatangan wisatawan sehingga akan timbul kesan yang baik.
- h) Dinas Pariwisata melakukan berbagai macam promosi, yang pada dasarnya promosi dilakukan seperti pembuatan brosur-brosur, poster, *leafled*, *bookled*, dan *calendar of event*.
- i) Dengan menggalakkan “MEDAN BESTARI” yaitu Medan kota bersih, sehat, tertib, aman, rapi, dan indah.
- j) Mengirim dan menyebarluaskan *brochure*, *leafled*, *folders*, buku panduan tentang obyek wisata dan hotel-hotel di kota Medan.

g. Pengembangan Kemitraan

Kemitraan dalam konteks pengembangan pariwisata di kota Medan adalah mengenai bagaimana menjalin hubungan, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dengan *stakeholder-stakeholder*, dan juga masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Menggandeng pihak swasta sebagai investor dalam kegiatan pariwisata.
- b) Melakukan penyuluhan kepada pada *stakeholder* baik swasta maupun lembaga yang ada

- kaitannya dengan kegiatan pariwisata tentang pentingnya mengambil peranan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata
- c) Pengembangan lembaga pendidikan pariwisata sebagai pencetak SDM pariwisata yang kompeten sesuai dengan tuntutan pasar.
- d) Peningkatan koordianasi antar lembaga pariwisata maupun *non* pariwisata dengan pihak kedua (Swasta dan masyarakat) dalam pengembangan pariwisata kota Medan.

h. Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) Pengembangan Pariwisata Kota Medan.

Dalam mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan, maka pengembang wajib melakukan manajemen kontrol yang efektif. dalam pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata Dinas Pariwisata kota Medan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Melakukan sinergi antara *Stakeholder* dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan kontrol kepariwisataan
- b) Membentuk tim *mapping* dan *updating* industri pariwisata dan;
- c) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata.

D. Kendala Yang Dihadapi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Medan

Dalam upayanya melaksanakan perannya sebagai *stakeholder* pengembangan pariwisata di kota Medan, Dinas Pariwisata menghadapi beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Keterbatasan Anggaran
Dengan anggaran yang terbatas, Dinas Pariwisata harus dapat melakukan perannya dalam mengembangkan potensi pariwisata secara optimal. sumber anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata seluruhnya berasal dari APBD, sedangkan kondisi APBD daerah kota Medan tidak cukup besar untuk dapat didistribusikan ke Dinas Pariwisata.
- b. Keamanan dan kenyamanan yang masih belum terjaga dengan baik dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal menjaga keasrian dan kebersihan, serta pelayanan yang baik terhadap wisatawan yang berkunjung ke kota Medan.
- c. Rendahnya sadar wisata masyarakat tentang pentingnya peran dan arti kepariwisataan, sehingga menimbulkan masalah terhadap wisatawan
- d. Kurangnya Pembangunan infrastuktur.
- e. Obyek wisata yang ada di kota Medan seperti Tjong A

Fie dan Istana Maimun masih terikat dalam ahli waris kekeluargaan. sehingga pengelolaannya belum diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata kota Medan dalam mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:
 - a) Pengembangan Perencanaan Pengelolaan Pariwisata
 - b) Pengembangan Metode Pengelolaan Pariwisata
 - c) Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - d) Pemberdayaan Masyarakat
 - e) Pengembangan Atraksi Seni Budaya
 - f) Pengembangan Promosi/Pemasaran
 - g) Pengembangan Kemitraan
 - h) Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan Pengendalian (BINWASDAL)
Pengembangan Pariwisata
2. Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata kota Medan mengalami beberapa kendala dalam pengembangannya. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah kendala internal dan kendala eksternal. kendala tersebut tentunya mempunyai upaya

untuk mengatasinya, yang dapat dilihat sebagai berikut :

a. Kendala Internal

1) Keterbatasan Anggaran

Terbatasnya dana pasti akan mempengaruhi pengembangan pariwisata karena pengembangan yang dilakukan tidak maksimal. usaha pengembangan dalam sektor pariwisata membutuhkan dana yang cukup besar, yaitu dana untuk pengembangan obyek wisata, saran dan prasarana yang menunjang kegiatan kepariwisataan, sumberdaya pengelola pariwisata dan lain-lain.

2) Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepariwisataan yaitu buruk atau rendahnya kualitas sumber daya pengelola usaha pariwisata akan berdampak rendahnya kualitas manajemen pariwisata, mutu pelayanan yang akan berakibat pada penurunan jumlah wisatawan.

b. Kendala Eksternal

1) Faktor Masyarakat

Masyarakat selain menjadi faktor pendukung juga dapat menjadi faktor kendala. hal ini disebabkan karena masyarakat kota

medan belum siap terhadap perubahan yang terjadi didunia pariwisata.

2) Kurangnya Pembangunan

Infrastuktur yang disebabkan minimnya anggaran yang di distribusikan untuk pembangunan infrastuktur pendukung kegiatan pariwisata.

3) Kondisi keamanan dan kenyamanan

lingkungan yang belum terjaga dengan baik dengan masih tingginya kriminalitas yang terjadi di kota Medan.

B. Saran

1. Agar menjadikan kota Medan sebagai kota wisata tentu saja terdapat beberapa faktor yang harus dibenahi dalam mengangkat citra pariwisata kota Medan salah satunya adalah keseriusan pemerintah kota Medan melalui Dinas Pariwisata membenahi obyek wisata di kota Medan, mempromosikan obyek wisata, dan memperbaiki infrastuktur yang belum optimal.

2. Mengingat banyaknya kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata kota Medan dalam upaya pengembangan pariwisatanya, tentunya Dinas Pariwisata harus terus mencari solusi dalam menangani kendala tersebut. seperti terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas

Pariwisata, maka perlu untuk menarik investor, terutama dalam hal pengembangan obyek wisata buatan dan penyediaan fasilitas.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Halim, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- A.Hari, Karyono, *Kepariwisataaan*, (Jakarta : Grasindo, 1997).
- A. J, Mulyadi, *Kepariwisataaan dan Perjalanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Bagyono, *Pariwisata dan Perhotelan*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2014).
- Erly, Suandy, Wisnaya *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
- Inu Kencana Syafie, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2011).
- I.Gusti, Bagus Ardana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- I.Made, Bayu Wisnaya, *Pariwisata Bali Global*, (Bali: Tegal Jaya, 2012).
- Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: Grasindo, 2009).
- Lili, Romli, *Potret Otonomi dan Wakil Rakyat Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Manahati, Zebua, *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah*, (Yogyakarta: Depublish, 2016).
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).
- Ni'matul, Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah dan Perembangannya, dan Problematikanya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Pendit, S. Nyoman, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, (Jakarta: PT.Pradya Paramita, 2002).
- Ridwan, Mohammad, *Perencanaan Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata*, (Medan Polonia: PT. Softmedia, 2012).
- Rozali, Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Siswanto, Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007).
- Sugiama, A Gima, *Ecotourism : Pengembangan Pariwisata Berbasis Konservasi Alam*, (Bandung: Guardayana Intimarta, 2011).
- Sunaryo, Bambang, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013).



Suwantoro, Gamal, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2004)

Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2004).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Walikota Medan No.1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. JURNAL :

Alia Rizki Nabila dan Tri Yuniningsih, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang*, *Journal Policy and Management Review*, Vol.5, No.3, Tahun 2016.

Muhammad Tahwin, *"Pengembangan Obyek Wisata Sebagai Industri Stusi Kasus Kabupaten Rembang."* Vol 1, No.3-2003.

D. INTERNET :

Risky Abadi, 8 *Pengertian Dan Pengembangan Menurut Para Ahli*. Dalam www.SatuJam.Com/Penelitian-Dan-Pengembangan/, Diunduh Pada Senin 21 Oktober 2019